



## **Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik**

**Anita Primastiwi, Dewi Kusuma Wardani, Hanisah\***

*Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Kampus 2 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.76>

### **Kata kunci:**

e-procurement; sistem kontrol internal; pencegahan penipuan pengadaan barang dan jasa

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah e-procurement, Sistem Pelaporan Pelanggaran dan sistem kontrol internal memengaruhi pencegahan pengadaan barang dan jasa secara curang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 63 responden, yaitu karyawan pengadaan barang dan jasa yang telah bertugas minimal 1 tahun di lingkungan instansi pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Unit Layanan Pengadaan dan Unit Kerja Daerah Kota Yogyakarta. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji parsial. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan sistem e-procurement dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan penipuan pengadaan barang dan jasa

### **Keywords:**

e-procurement; internal control system; prevention of fraudulent procurement of goods and services

### **Abstract**

This study aims to examine whether e-procurement, Whistleblowing System and internal control systems influence the prevention of fraudulent procurement of goods and services. This research method uses quantitative methods and primary data. The sample used in this study amounted to 63 respondents, namely employees of procurement of goods and services who have served at least 1 year in the environment of Yogyakarta City regional government agencies, the Procurement Services Unit and the Yogyakarta City Regional Work Unit. The sample method used was purposive sampling, while the data analysis technique used partial test. The results of research conducted indicate that the existence of e-procurement and internal control systems has a significant positive effect on fraud prevention of goods and services procurement.

\*Corresponding Author: **Hanisah,**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia;*

Email: [hanisaanisa97@gmail.com](mailto:hanisaanisa97@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi ciri khas bagi lingkungan instansi, termasuk instansi kesehatan dan pendidikan. LKPP menyatakan bahwa jumlah belanja untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah berasal dari APBN dan APBD. Tahun 2017 mencatat jumlah anggaran sebesar 1000 triliun rupiah dan meningkat jumlahnya pada tahun 2018 menjadi 1200 triliun rupiah. meningkatnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh negara adalah untuk meningkatkan jumlah pembangunan sarana maupun prasarana. Namun dalam kegiatan pelaksanaan tidak luput dari penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Komisi Pemberantasan korupsi menyatakan bahwa 70% korupsi di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasa. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk dana kapitasi melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan. Tahun 2016 sebanyak 9.767 puskesmas ditetapkan anggaran untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) diseluruh Indonesia menerima dana kapitasi sebesar Rp 13 triliun. Pada tahun 2017 dana kapitasi yang digelontorkan diperkirakan Rp 14 triliun. Rata-rata setiap FKTP akan mendapatkan dana kapitasi sebesar Rp 400 juta pertahun (ICW, 2018).

Hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terhadap potensi korupsi dana kapitasi di FKTP milik daerah, ada delapan kasus dalam rentang 2014-2018. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,8 miliar diantaranya kasus ini melibatkan beberapa dinas kesehatan di Indonesia baik itu dinas kesehatan kabupaten maupun kota. Dalam kasus ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga ikut terlibat dalam penyalagunaan dana kapitasi. Selain kasus diatas adapun kasus yang diduga korupsi senilai Rp 21 milyar lebih, yang melibatkan sebuah lembaga pendidikan di Yogyakarta (JawaPos.com 2018). Adanya dugaan korupsi tersebut terkait dengan pengadaan barang operasional tahun 2015-2016. Kasus tersebut mulai diselidiki sejak Desember 2016 terkait dengan temuan dana ratusan yang diduga hasil korupsi di Kantor Lembaga Diklat tersebut.

Kedua kasus yang menyebabkan kerugian negara dan kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan yang terjadi karena tingkatkannya kebocoran anggaran dan pengukuran kinerja berbasis kemampuan menyerap anggaran (Sadeli, 2018). Beragam upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga korupsi dalam area pengadaan barang dan jasa dapat dicegah.

Salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah melalui kebijakan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang dan jasa harus diwajibkan instansi daerah untuk menerapkan secara elektronik atau biasa disebut *e-procurement* pada sebagian paket pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus dilakukan seluruh paket pengadaan. Dengan pengaturan Perpres tersebut diharapkan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan dalam proses pengadaa barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Dewi (2018) dan Artanti, Handjani & Pituringi (2016) bahwa penelitian yang dilakukan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2016) menemukan bahwa *e-procurement* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang jasa.

Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah terjadi selama ini karena kurangnya atau lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal (Kawedar, 2010). Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang berlaku pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai dilingkungan instansi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan (PP /60/2008). Oleh karena itu, sistem pengendalian dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di Sektor Publik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suliaman (2016) & Puspanda (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Nanda (2018) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh

terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa perdebatan dari hasil masing-masing penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di Sektor publik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori Reformasi Birokrasi***

Menurut KEMENPAN No.15 Tahun 2015 reformasi birokrasi merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Berdasarkan konsep reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal terutama yang berkaitan dengan sistem bernegara, berorganisasi dan pemerintahan (Hendrayadaya 2011).

Berdasarkan pengertian reformasi dan birokrasi maka secara luas reformasi birokrasi merupakan suatu perbaikan, perubahan atau penyempurnaan dari sebuah sistem dan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien sehingga bebas dari adanya tindakan kecurangan. Laporan tahunan dari KPK menjelaskan bahwa kasus korupsi dari tahun 2011-2015 berasal dari realisasi pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa elektronik telah diwajibkan dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya penerbitan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Purwanto (2008) mendefinisikan bahwa *e-procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Teori reformasi birokrasi dapat diimplementasikan pada sistem pengendalian internal pemerintah, Misalnya pada pengambilan keputusan, pengawasan, perencanaan yang efisien dan efektif dalam melakukan tata kelola pemerintahan. Wilopo (2015) menyatakan tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi

pada suatu instansi publik maupun privat, dengan segala modusnya, dari yang sederhana sampai yang sangat rendah dan rumit, seharusnya menyadarkan semua pihak yang bekerja dibidangannya untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik, tanpa adanya kesadaran dan bukti akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja pengadaan barang dan jasa yang baik. Sebagai reaksi tuntutan dari masyarakat untuk mengembalikan fungsi pemerintah (*good government*) sebagai penyelenggaraan negara dan sebagai pelayanan masyarakat maka birokrasi pemerintah harus mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori reformasi birokrasi mengacu pada perubahan-perubahan sistem atau prosedur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam penelitian ini teori-teori reformasi birokrasi untuk menjelaskan pengaruh penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

### ***E-procurement***

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Brande & Carey (2011) menyatakan bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada pengguna internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan dan manfaat *e-procurement*, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Metode pelaksanaan menurut Willem (2012) dalam kegiatan *e-procurement* terdapat empat metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Cataloge* dan *e-Purchasing* (tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Cataloge*).

### ***Sistem Pengendalian Internal Pemerintah***

Sistem pengendalian internal pemerintah menurut COSO (2013) ada 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assesment*), aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi (*information and communication*) dan pemantauan (*monitoring*).

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang mengenai pada tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan dan visi misi yang telah ditentukan (Lisa 2013).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pada prinsip-prinsipnya yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, akuntabel. Adapun metode pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diantaranya pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung seleksi memberikan keyakinan memadai tentang umum, seleksi sederhana, sayembara, penunjukkan langsung, pengadaan langsung.

### **Kerangka Pikiran**

Kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti yaitu berdasarkan uraian teori dan kasus diatas maka kerangka pikirannya adalah variabel independen pengaruh penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di Sektor Publik, dan pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di Sektor Publik. Pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa (Y) sebagai variabel dependen, *e-procurement* (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2).

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Jenis penelitian ini adalah kausalitas bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Kuncoro, 2013).

### **Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel terikat atau dependen, 2 (empat) variabel bebas atau independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-procurement* (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2). Indikator variabel *e-procurement* yaitu: tahapan pelaksanaan *e-procurement* dan metode pelaksanaan *e-procurement*. Indikator variabel sistem pengendalian internal pemerintah yaitu terdiri lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Indikator variabel dependen pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa yaitu terdiri pengawasan oleh komite audit, tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan dan budaya jujur dan etika yang tinggi.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian adalah pelaku pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan dan Satuan Kerja Perangkat Kota Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaku pengadaan yang menjabat minimal 1 tahun yang telah dianggap mengerti atau menguasai dalam bidang pengadaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

### **Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantu SPSS versi 18.0. menggunakan SPSS versi 18.0 dengan bantuan Microsoft Excel untuk melakukan analisis uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji kualitas data. Uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui data yang kita digunakan berdistribusi normal dengan menggunakan uji normalitas (Ghozali, 2013). Uji hipotesis adalah uji data untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji parsial. Uji kualitas data adalah uji data yang digunakan untuk mengetahui handal dan validnya pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang disebar atau diperoleh secara langsung dari obyek atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan menyebarkan kuesioner. Data akan diambil dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuisisioner tersebut kepada responden pelaku pengadaan di Unit Pelayanan Pengadaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dengan cara memberikan kuesioner kepada instansi dan dikoordinasikan satu orang untuk menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

**Uji Kualitas Data**

Uji Validitas Pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan dan apa bila *pearson correlation* memiliki nilai di bawah 0,05 maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui data yang ada dikatakan handal dan reliabel dengan melihat *cronbach alpha*, variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,06 (Ghozali, 2013).

**Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabelitas**

Variabel	Validity	Reliabilitas
E-procurement		
Item 1.1	0,513	0,897
Item 1.2	0,517	
Item 1.3	0,535	
Item 1.4	0,711	
Item 1.5	0,699	
Item 1.6	0,637	
Item 1.7	0,687	
Item 1.8	0,667	
Item 1.9	0,703	
Item 1.10	0,801	
Item 1.11	0,691	
Item 1.12	0,466	
Item 1.13	0,731	
Item 1.14	0,471	
Item 1.15	0,546	
Item 1.16	0,627	
Item 1.17	0,464	
Item 1.18	0,664	
Sistem pengendalian internal pemerintah		
Item 3.1		0,915
Item 3.2		
Item 3.3	0,656	
Item 3.4	0,792	
Item 3.5	0,811	
Item 3.6	0,844	
Item 3.7	0,351	
Item 3.8	0,729	
Item 3.9	0,350	
Item 3.10	0,565	
Item 3.11	0,847	
Item 3.12	0,894	
Item 3.13	0,617	
Item 3.14	0,793	
Pencegahan	0,660	0,788
Kecurangan Pengadaan barang dan jasa	0,772	
Item 4.1		
Item 4.2		
Item 4.3		
Item 4.4	0,360	
Item 4.5	0,795	
Item 4.6	0,742	

Item 4.7	0,613
Item 4.8	0,475
	0,851
	0,885
	0,542

Sumber : output data primer yang diolah, 2019

Dari Tabel 1 hasil diatas menunjuk bahwa setiap pertanyaan yang dijawab oleh responden valid dan reliabilitas maka dapat gunakan sebagai data untuk penelitian.

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen kedua variabel ini mempunyai distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji statistika non parametik *kolmogorov smirnov*, suatu varibel dikatan normal jika *Asymp.sig* > 0,05 (Ghozali, 2013).

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		63
Normal	Mean	0,0000000
Parameters <sup>a</sup>	Std.	2,12706683
<sup>b</sup>	Deviation	
Most	Absolute	0,235
Extreme	Positive	0,193
Differences	Negative	-0,235
Kolmogorov-Smirnov Z		0,941
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,851

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber:Output data primer 2019

**Tabel 2. Uji Normalitas**

Dari Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji normalitas dalam model regresi variabel independen dan dependen kedua variabel ini mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dapat dilihat nilai *asymp.sig* > 0,05 maka 0,851 > 0,05 kedua variabel independen dan dependen berdistribusi normal.

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis menggunakan uji parsial untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap variabel dependen, dengan melihat nilai probabilitasnya sig lebih kecil dari probabilitas 0,05 atau sig < 0,05. Maka dapat disimpulkan Ha diterima Ho ditolak.

**Tabel 3. Uji Parsial (t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,869	3,380		4,727	,000
X1	,278	,054	,309	3,044	,002
X2	,328	,071	,629	4,630	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output data primer 2019

Dari Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji parsial untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh variabel independen *e-procurement* berpengaruh secara parsial dengan nilai  $0,002 > 0,005$  terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Variabel independen sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara parsial dengan nilai  $0,000 > 0,005$  terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

## B. Pembahasan

### ***Implementasi E-procurement Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta***

Sistem pengadaan secara elektronik ini dapat mempengaruhi inefisiensi pengadaan dengan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pemanfaatan *e-procurement* bagi pemerintah adalah salah satu wujudnya nyata prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengadaan yang transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan teori reformasi birokrasi dimana suatu perbaikan, perubahan atau penyempurnaan dari sebuah sistem dan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Reformasi dalam pemerintahan yaitu mengubah proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional dimana sistem konvensional yaitu pihak yang terlibat dalam proses pelelangan pengadaan antara pihak penyedia dan pengguna saling bertemu dan melakukan kontak fisik dalam proses pengadaan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintansari, Hapsari & Budiono (2018) dan Arjun, Jeffery, Kishor & Jianming (2012) yang menemukan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

### ***Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Yogyakarta***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara maksimal maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menjelaskan tentang sistem pengendalian internal pemerintah dimana yang lebih menitikberatkan pada *soft control* yang meliputi etika, moralitas, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dan menguasai perangkat lunak lainnya. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mencegah terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan secara maksimal *soft control* sehingga peluang untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir. Sifat sistem pengendalian internal pemerintah yaitu *integrated* dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh instansi pemerintah serta bersifat dinamis dan sering berkembangnya jaman untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Fungsi sistem pengendalian internal pemerintah ini adalah sebagai tolak ukur untuk pengujian efektifitas, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, serta perkembangan teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan teori reformasi birokrasi dimana sistem pengendalian internal pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dari paket reformasi keuangan negara menuju *good governance* atau tata kelola yang baik. Penelitian ini didukung oleh Yasa (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 63 pelaku pengadaan dan pelaku pengawasan internal dan eksternal di Unit layanan pengadaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang telah di analisis menggunakan SPSS versi 18.0 menunjukkan bahwa dengan adanya pengaruh penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

#### Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas yaitu pemberian kompensasi dan ditambahkan variabel terikat yaitu pendeteksi kecurangan pengadaan.
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Memberikan hukuman bagi yang melakukan kecurangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nasution. (2016). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh : Achmad Nasution Pendahuluan Pengendalian Intern. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3(1), 73–82.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran *E-Procurement* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16–32.
- Azmi, L. M., Herwanti, T., & Asmony, T. (2017). *E-procurement Fraud In Government Sector e : In The Perspective Of Fraud Diamond Theory. E-Proceeding Stie Mandala*, 0(0), 143–163. Retrieved from <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/e-proceeding/article/view/131>
- Dewi, V. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Fraud Pada Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa. *Skripsi*, 1(September), 160–164.
- Faisol, Tarjo, M. (2013). Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Di Sektor publik.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 16*. (6th ed) Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hendrayady, A. (n.d.). Reformasi Administrasi Publik. (2011)
- Indah, N., Dewi, S., E, E. S. S., Si, M., & Prayudi, A. (2017). Pengaruh Faktor-faktoe Keberhasilan pada Implementasi *E-*

*procurement* Terhadap Pencegahan Kecurangan *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 1*(2).

- Lintangsari, M., Wahyu Hapsari, D., & Budiono, E. (2017). Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten) *The Effect of E-Procurement Implementation, Internal Control of Preventing Fraud* (Empirical Stu. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 2661.
- LKPP. (2014). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia. 1–12.
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). *Role Of Public E-procurement Technology To Reduce Corruption In Government Procurement* 1 Arjun Neupane, Jeffrey Soar, Kishor Vaidya, and Jianming Yong. *Public, International Conference, Procurement Neupane, Washington Faculty, Information Systems Queensland, Southern*, (August), 304–334.
- Nisak, C., Fitri, P., & Kurniawan, A. (2013). Sistem Pengendalian Internl Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan. *Jaffa*, 01(1), 15–22.
- Oguda, N. J., Odhiambo, A., & Byaruhanga, J. (2015). *Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47–57.
- Oktaviani, L. (2017). Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik. *Skripsi*, 01, 1–26. Retrieved from <http://www.albayan.ae>.